

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 13 DESEMBER 2022

RINGKASAN BERTA HARI INI

BANGKU POJK

BPBD Sidoarjo Bekali Siswa SMP IT Inka Pendidikan Mitigasi Bencana

Sidoarjo, Bihrawa - Siswa SMP Islam Terpadu Insan Kami (PT Inka) dibekali mitigasi bencana oleh Petugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Sidoarjo. Edukasi ini sebagai bentuk pemeliharaan ketertarikan bencana dan upaya yang harus dilakukan siswa maupun guru. Mengingat kondisi gedung sekolah yang berdekatan serta belum adanya rambu-rambu jalur evakuasi.

Sebelum dilakukan simulasi Mitigasi Bencana, para guru dan siswa terlebih dulu diberikan materi teori tentang penanganan bencana, persiapan sarana dan prasarannya, komunikasinya dan bentuk-bentuk penyelamatannya, juga penyelamatan mandiri. Tersebut juga pendidikan pengetahuan logistiknya Kepala SMP IT Insan Kami Sodikandam, Anggoti Ubah, menuntun siswa memberikan edukasi Mitigasi Bencana kepada guru dan seluruh siswanya. Mengingat Indonesia ini sering terjadi bencana alam, sehingga pihaknya perlu mengedukasi siswa dan guru. Apalagi gedung-gedung sekolahnya hampir semuanya berbangkai. "Jadi sangat perlu sekali adanya Mitigasi Bencana, sehingga mereka akan tahu bagaimana proses penyelamatannya. Gimana jalur evakuasinya, serta di mana titik kumpulnya," tuturnya.

Dalam pelatihan mitigasi bencana ini, pihaknya bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Ini mengingat BPBD merupakan lembaga yang mumpuni dalam penanganan bencana. Harapannya, setelah edukasi ini siswa dan guru akan lebih mudah dan paham apa yang dilakukan pertama kali bila terjadi bencana.

Pada kesempatan ini, Koordinator Lapangan BPBD Sidoarjo Hamdan Maulana menjelaskan kepada para siswa cara evakuasi untuk mencari jalan atau rute tercepat menuju halaman terluar. Disamping itu bila terjadi bencana juga jangan panik dan jangan langsung lari, sembari menunggu gempa reda lebih dulu.

"Ketika gempa terjadi atau ada bangunan bergoyang, sebaiknya jangan ada larinya tidak stabil. Dalam kondisi tersebut, sebaiknya mencari tempat berlindung," katanya. (ach.ia)

Progres Capai 90 Persen

SMPN 2 Tulangan

Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Abdul Muhibur Alim memperkirakan bahwa Januari yang menjadi bulan terakhir untuk menyelesaikan pembangunan SMPN 2 Tulangan sudah bisa diupayakan untuk selesai Desember 2022. Seperti rencana pekerjaan yang telah selesai diantaranya, pengisian pondasi, pemasangan jalan beton dan pembangunan IAL.

Bupati Gus Muhibur meninjau progres adalah yang berlokasi di Desa Griyanti Kecamatan Tulangan ini untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu.

"Kita harus cek lapangan memastikan progres pembangunan SMPN 2 Tulangan, karena pekerjaan ini sangat penting untuk masyarakat Tulangan. Untuk itu, saya akan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu," kata Bupati.

Progres pembangunan SMPN 2 Tulangan, saat ini sudah mencapai 90 persen. Untuk itu, Bupati Gus Muhibur memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. "Kita harus cek lapangan memastikan progres pembangunan SMPN 2 Tulangan, karena pekerjaan ini sangat penting untuk masyarakat Tulangan. Untuk itu, saya akan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu," kata Bupati.

Pembangunan Jalan Beton dan Pembangunan IAL

SMPN 2 Tulangan

Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Abdul Muhibur Alim memperkirakan bahwa Januari yang menjadi bulan terakhir untuk menyelesaikan pembangunan SMPN 2 Tulangan sudah bisa diupayakan untuk selesai Desember 2022. Seperti rencana pekerjaan yang telah selesai diantaranya, pengisian pondasi, pemasangan jalan beton dan pembangunan IAL.

Bupati Gus Muhibur meninjau progres adalah yang berlokasi di Desa Griyanti Kecamatan Tulangan ini untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu.

"Kita harus cek lapangan memastikan progres pembangunan SMPN 2 Tulangan, karena pekerjaan ini sangat penting untuk masyarakat Tulangan. Untuk itu, saya akan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu," kata Bupati.

Pembangunan Jalan Beton dan Pembangunan IAL

SMPN 2 Tulangan

Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Abdul Muhibur Alim memperkirakan bahwa Januari yang menjadi bulan terakhir untuk menyelesaikan pembangunan SMPN 2 Tulangan sudah bisa diupayakan untuk selesai Desember 2022. Seperti rencana pekerjaan yang telah selesai diantaranya, pengisian pondasi, pemasangan jalan beton dan pembangunan IAL.

Bupati Gus Muhibur meninjau progres adalah yang berlokasi di Desa Griyanti Kecamatan Tulangan ini untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu.

"Kita harus cek lapangan memastikan progres pembangunan SMPN 2 Tulangan, karena pekerjaan ini sangat penting untuk masyarakat Tulangan. Untuk itu, saya akan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu," kata Bupati.

Pasca RPU Ditutup, Pedagang Pasar Sepanjang Mengeluh Sepi Pembeli

Sidoarjo (BM) - Industri ekonomi di kawasan ini mengalami penurunan, pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup.

Pasca RPU Ditutup, Pedagang Pasar Sepanjang Mengeluh Sepi Pembeli

Sidoarjo (BM) - Industri ekonomi di kawasan ini mengalami penurunan, pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup.

Pasca RPU Ditutup, Pedagang Pasar Sepanjang Mengeluh Sepi Pembeli

Sidoarjo (BM) - Industri ekonomi di kawasan ini mengalami penurunan, pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup.

Pasca RPU Ditutup, Pedagang Pasar Sepanjang Mengeluh Sepi Pembeli

Sidoarjo (BM) - Industri ekonomi di kawasan ini mengalami penurunan, pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh sepi pembeli. Hal ini terjadi karena RPU (Rencana Umum Pertumbuhan Daerah) telah ditutup.

Targetkan Pajak Daerah 2023 Sebesar Rp 1,130 Triliun

Sidoarjo - Realisasi rencana pajak daerah 2023 ditargetkan mencapai Rp 1,130 triliun. Hal ini merupakan target yang cukup tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Targetkan Pajak Daerah 2023 Sebesar Rp 1,130 Triliun

Sidoarjo - Realisasi rencana pajak daerah 2023 ditargetkan mencapai Rp 1,130 triliun. Hal ini merupakan target yang cukup tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Targetkan Pajak Daerah 2023 Sebesar Rp 1,130 Triliun

Sidoarjo - Realisasi rencana pajak daerah 2023 ditargetkan mencapai Rp 1,130 triliun. Hal ini merupakan target yang cukup tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Targetkan Pajak Daerah 2023 Sebesar Rp 1,130 Triliun

Sidoarjo - Realisasi rencana pajak daerah 2023 ditargetkan mencapai Rp 1,130 triliun. Hal ini merupakan target yang cukup tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Uji Publik, Partai Lama Pilih Rancangan Dapil Tak Berubah

KOTA - Rancangan 1 pe-nataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sidoarjo untuk pemilihan umum 2024 diminati mayoritas partai politik (parpol). Hal ini terungkap dalam uji publik yang dilakukan di bagian dari proses penyusunan dapil dalam 2022 nanti. "Tapi tabung politik dari kami yang melibatkan elemen masyarakat," katanya.

Uji Publik, Partai Lama Pilih Rancangan Dapil Tak Berubah

KOTA - Rancangan 1 pe-nataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sidoarjo untuk pemilihan umum 2024 diminati mayoritas partai politik (parpol). Hal ini terungkap dalam uji publik yang dilakukan di bagian dari proses penyusunan dapil dalam 2022 nanti. "Tapi tabung politik dari kami yang melibatkan elemen masyarakat," katanya.

Uji Publik, Partai Lama Pilih Rancangan Dapil Tak Berubah

KOTA - Rancangan 1 pe-nataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sidoarjo untuk pemilihan umum 2024 diminati mayoritas partai politik (parpol). Hal ini terungkap dalam uji publik yang dilakukan di bagian dari proses penyusunan dapil dalam 2022 nanti. "Tapi tabung politik dari kami yang melibatkan elemen masyarakat," katanya.

Uji Publik, Partai Lama Pilih Rancangan Dapil Tak Berubah

KOTA - Rancangan 1 pe-nataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sidoarjo untuk pemilihan umum 2024 diminati mayoritas partai politik (parpol). Hal ini terungkap dalam uji publik yang dilakukan di bagian dari proses penyusunan dapil dalam 2022 nanti. "Tapi tabung politik dari kami yang melibatkan elemen masyarakat," katanya.

Usulkan Rp 80 Miliar, Disetujui Rp 70 Miliar

Sidoarjo - Proyek pemenuhan kewajiban dana transfer ke DPRD Sidoarjo sudah ditinjau dan disetujui. Usulan Rp 80 miliar, disetujui Rp 70 miliar. Hal ini merupakan keputusan yang diambil oleh DPRD Sidoarjo. Usulan tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di DPRD Sidoarjo.

Usulkan Rp 80 Miliar, Disetujui Rp 70 Miliar

Sidoarjo - Proyek pemenuhan kewajiban dana transfer ke DPRD Sidoarjo sudah ditinjau dan disetujui. Usulan Rp 80 miliar, disetujui Rp 70 miliar. Hal ini merupakan keputusan yang diambil oleh DPRD Sidoarjo. Usulan tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di DPRD Sidoarjo.

Usulkan Rp 80 Miliar, Disetujui Rp 70 Miliar

Sidoarjo - Proyek pemenuhan kewajiban dana transfer ke DPRD Sidoarjo sudah ditinjau dan disetujui. Usulan Rp 80 miliar, disetujui Rp 70 miliar. Hal ini merupakan keputusan yang diambil oleh DPRD Sidoarjo. Usulan tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di DPRD Sidoarjo.

Usulkan Rp 80 Miliar, Disetujui Rp 70 Miliar

Sidoarjo - Proyek pemenuhan kewajiban dana transfer ke DPRD Sidoarjo sudah ditinjau dan disetujui. Usulan Rp 80 miliar, disetujui Rp 70 miliar. Hal ini merupakan keputusan yang diambil oleh DPRD Sidoarjo. Usulan tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di DPRD Sidoarjo.

Taat Pajak, Wujud Warga Wage Dapat Sepeda Gunung dari Bupati

Sidoarjo, Pojok Kiri - Bupati Sidoarjo Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak. Bupati Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak.

Taat Pajak, Wujud Warga Wage Dapat Sepeda Gunung dari Bupati

Sidoarjo, Pojok Kiri - Bupati Sidoarjo Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak. Bupati Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak.

Taat Pajak, Wujud Warga Wage Dapat Sepeda Gunung dari Bupati

Sidoarjo, Pojok Kiri - Bupati Sidoarjo Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak. Bupati Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak.

Taat Pajak, Wujud Warga Wage Dapat Sepeda Gunung dari Bupati

Sidoarjo, Pojok Kiri - Bupati Sidoarjo Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak. Bupati Gus Muhibur Alim memberikan sepeda gunung kepada warga yang taat pajak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga yang taat pajak.

Diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas dan Risalah Sekretariat DPRD Sidoarjo



ASPIRASI: Uji publik yang digelar KPU Sidoarjo terkait rancangan dapil. HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO

Uji Publik, Partai Lama Pilih Rancangan Dapil Tak Berubah

KOTA-Rancangan 1 penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sidoarjo untuk pemilihan umum 2024 diminati mayoritas partai politik (parpol). Hal itu terungkap dalam uji

publik rancangan penataan dapil, Senin (12/12).

Setidaknya ada 15 parpol yang bersuara untuk penerapan penataan dapil dengan rancangan 1. Yakni Partai Demokrat,

● Ke Halaman 10



Uji Publik,...

PKS, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, PBB, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Gerindra, PPP dan PKN.

Mereka sebagian besar adalah partai lama. Termasuk saat ini telah memiliki kursi di DPRD Sidoarjo. "Rancangan 1 ini menampung prinsip kesinambungan," kata Nanang, perwakilan dari Partai Golkar.

Sementara itu, beberapa partai

juga berpendapat bahwa rancangan 2 juga perlu dipertimbangkan. Suara itu muncul dari parpol-parpol yang masuk dalam kategori baru dalam pesta demokrasi ini. Yakni Partai Umat, Partai Garuda, dan PSL.

"Menurut kami yang cocok adalah rancangan terbaru. Yakni rancangan 2. Kami kalah start, kalau rancangan lama tentu menguntungkan partai lama," kata perwakilan dari Partai Umat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M Iskak mengungkapkan, uji

publik yang dilakukan itu bagian dari proses penyusunan dapil dalam pemilu 2024 nanti. "Ini tahapan puncak dari kami yang melibatkan elemen masyarakat," katanya.

Iskak menambahkan, hasil uji publik yang telah digelar itu akan dibawa ke KPU RI. Karena KPU RI yang berwenang untuk memutuskan bagaimana rancangan dapil dalam pemilu nanti. Masukan dari hasil uji publik akan menjadi salah satu pertimbangan KPU RI dalam memutuskan.

Diberitakan sebelumnya, rancan

gan 1 menggambarkan bahwa dapil di Sidoarjo tetap terbagi dalam 6 dapil. Yakni Sidoarjo 1 terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Sedati. Sidoarjo 2 terdiri dari Kecamatan Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi. Sidoarjo 3 terdiri dari Kecamatan Prambon, Krembung, Tulangan, Wonoayu. Sidoarjo 4 terdiri dari Kecamatan Tarik, Krian, Balongbendo. Sidoarjo 5 terdiri dari Kecamatan Taman, Sukodono. Sidoarjo 6 terdiri dari Kecamatan Gedangan dan Waru. (son/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIMAS MAULANA/JAWA POS

OBJEK PAJAK: Deretan kafe dan restoran di kawasan kavling DPRD Sidoarjo kemarin (12/12). Realisasi pajak daerah pada akhir 2022 berhasil melampaui target.

Targetkan Pajak Daerah 2023 Sebesar Rp 1,130 Triliun

SIDOARJO - Realisasi sembilan pajak daerah Sidoarjo sampai saat ini sudah tembus 106 persen. Padahal, Desember belum berakhir. Tahun depan target realisasi mencapai Rp 1,130 triliun. Naik dari target tahun ini Rp 1,068 triliun.

Berdasar data Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, capaian pajak daerah tembus Rp 1,134 triliun. Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, jumlah tersebut bakal terus bertambah. Sebab, masih ada pencatatan yang belum masuk. Selain itu, pihaknya juga terus menyosialisasikan kesadaran membayar pajak.

"Tahun depan targetnya Rp 1,130 triliun, naik dari tahun ini," katanya. Dia optimistis target tersebut bakal tercapai. Salah satu strateginya, pihaknya akan menggenjot virtual pajak. Tujuannya, mengurangi proses administrasi manual. "Dulu itu tagihan pajak dicetak manual dan diantar ke masing-masing wajib pajak," katanya.

Saat ini, ada yang masih manual dan ada pula yang sudah digital. "Pada 2023, tidak ada pengantaran tagihan pajak manual lagi," katanya. Tagihan dikirimkan secara *online* langsung ke masing-masing WP. Hal itu mempercepat penyelesaian administrasi karena tidak perlu menunggu petugas mengantarkan tagihan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengapresiasi positif tim BPPD yang telah menunjukkan kinerjanya pada tahun ini. Sebab, sektor pajak jadi pendapatan asli daerah sebagai penopang

pemenuhan belanja daerah, baik infrastruktur maupun pembangunan manusia.

"Tahun anggaran 2023 kami tetap berharap BPPD menjaga kinerja positifnya, harus ditingkatkan lagi," katanya. Dia menilai, target tersebut sudah realistis. "Saya rasa potensi pajak daerah di tahun 2023 bisa menembus angka Rp 1,1 triliun," jelasnya. Terkait isu resesi, dia menyatakan tidak berpengaruh. "Kalau lihat perkembangan dua tahun ini, rasanya bisa kita atasi asalkan tidak ada pembatasan gerak penduduk seperti PPKM di tahun 2020 dan 2021 lalu," ungkapnya. (uzi/c6/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berita dnnmedia

Legislator DPRD Sidoarjo Ini Jelaskan Soal Sertifikasi Lahan SD dan SMP Negeri

Admin

Monday, December 12, 2022 | December 12, 2022 WIB
| 117 Views



H. Abdul Haris (DNI) saat mengikuti salah satu rapat bersama Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo.

DNN, SIDOARJO - Para tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) tak perlu khawatir kehilangan aset desanya ketika Pemkab Sidoarjo mensertifikatkan lahan yang dipakai untuk gedung-gedung sekolah negeri.

"Bunyi dalam sertifikat atas tanah SD atau SMP itu adalah hak guna pakai dan bukan hak milik Pemkab Sidoarjo," sebut Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Abdul Haris yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/12/2022) siang tadi.

Jika nantinya lahan tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk gedung sekolah maupun fasilitas umum lainnya, ataupun dialihfungsikan, lahan tersebut tetap akan kembali ke desa. Dan setelah sertifikat hak guna bangunan itu jadi, berkasnya disimpan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

"Ini buktinya. Kalau lahan itu jadi aset Pemkab, maka suratnya akan disimpan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-red)," imbuhnya.

Pernyataan ini disampaikan karena legislator PAN tersebut masih mendengar adanya penolakan yang dilakukan Pemdes atau tokoh-tokoh masyarakat saat tanah-tanah aset desa yang dimanfaatkan untuk SD maupun SMP Negeri serta fasilitas umum lainnya akan disertifikatkan oleh Pemkab Sidoarjo.

Menurutnya upaya legalisasi hak atas lahan tersebut penting agar DPRD Sidoarjo bisa mengalokasikan anggaran guna merawat bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Tanpa adanya sertifikat tersebut pengucuran dana yang dilakukan bakal dianggap ilegal.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Jadi harus ada kesamaan pemahaman terkait hal itu antara pihak Pemkab Sidoarjo dengan pemdes maupun tokoh masyarakat. Kalau sudah disertifikatkan, kita bisa lebih enak untuk menganggarkan dana renovasi dan lain sebagainya," jelas Haris lagi.

Menurutnya, saat ini pihaknya tak lelah mendorong Pemkab melalui BPKAD untuk melakukan sertifikasi lahan dan bangunan fasilitas publik tersebut. Berdasarkan laporan yang diterimanya, prosesnya masih terus berjalan sampai saat ini.

"On proses koq. Tapi sejauh apa progresnya, kami masih menerima informasi dari BPKAD. Sudah kami koordinasikan. Mungkin dalam satu atau dua hari ini akan saya sampaikan lagi hasilnya," kata politisi asal Waru itu.

Ia menambahkan, untuk biaya sertifikasi itu juga terbilang kecil. Hanya Rp 300 ribu saja untuk setiap bidang. Itupun dibagi dua, Rp 150 ribu disetor ke BPN sedangkan sisanya untuk honor petugas dari instansi terkait.

Sementara itu, Ketua Komite SDN Balongtani 1 Kecamatan Jabon, Imam Syafi'i yang dihubungi terpisah mengaku sempat melakukan penolakan. "Tapi kalau lahan sekolah itu tetap menjadi aset desa, ya silahkan disertifikatkan," ujarnya.

Dikatakannya, tarik-ulur proses sertifikasi lahan sekolah tersebut terjadi lantaran informasi yang diterima pihaknya tidak seperti itu. "Awalnya kami kira, begitu disertifikatkan, lahan SDN itu akan langsung menjadi aset Pemkab Sidoarjo," kata Imam.

Anggapan itulah yang memicu penolakan lantaran dulunya lahan SDN Balongtani tersebut berasal dari tanah cuwilan dari para petani desa yang diminta begitu saja oleh pemerintah tanpa adanya proses jual beli.
(pram/hans)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tahun Ini Dipastikan PAD Sidoarjo Dari Sektor Parkir Tak Penuhi Target

by Radar Jatim — 12 Desember 2022



Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Bambang Pujiyanto.



SIDOARJO (RadarJatim.id) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bisa dipastikan gagal dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tahun anggaran 2022 ini.

Karena hingga pekan kedua di bulan Desember 2022 ini, belum diketahui dengan pasti jumlah rupiah yang tersetor ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Sidoarjo, Senin (12/12/2022).

H. Bambang Pujiyanto, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa hingga saat ini anggaran yang masuk hanya Rp 300 juta dari target sebesar Rp 20,4 Milyar melalui sektor retribusi parkir.

“Itupun masih dikurangi honor pembayaran Jukir (Juru Parkir, red) sebesar Rp 1,5 Miliar dan biaya cetak karcis parkir,” katanya.

Dikatakan oleh politisi Partai Gerindra itu bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui nilai pendapatan dari hasil kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus yang dikelola oleh PT Indonesia Sarana Service (ISS).

“Berdasarkan informasi yang kami terima, sama sekali belum ada pembayaran imbal jasa kerjasama dari PT ISS sampai saat ini. Sepertinya polemiknya juga belum selesai, termasuk rencana adendum PKS (Perjanjian Kerjasama, red),” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini sehingga gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Ya harus dipertanggungjawabkan, kenapa sampai gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar itu," tandasnya.

Padahal di awal tahun 2022 lalu sempat berhembus angin surga dari hasil lelang kerjasama pengelolaan parkir tersebut yang menelurkan angka Rp 32,09 Miliar bersih tanpa potongan ke Kasda Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam lelang, uang itupun seharusnya dibayarkan di depan atau sebelum pihak rekanan Pemkab Sidoarjo beraksi di lapangan.

Namun dalam PKS yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dan Direktur PT ISS, klausul tersebut diubah menjadi pembayaran secara bertahap setiap tanggal 18/bulannya.

"Tahun 2021 lalu juga gagal. Nanti akan kita panggil OPD terkait untuk menjelaskan masalah ini," tegasnya.

Pada tahun anggaran 2020 lalu, Pemkab Sidoarjo yang saat itu masih dibawah kendali Penjabat Sementara (PJS) Bupati Sidoarjo Hudiono juga tak mampu memenuhi target pendapatan dari sektor layanan yang sangat potensial tersebut.



Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Sudjalil.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Sudjalil menekankan bahwa persoalannya saat ini bukan semata-mata pada besaran rupiah yang dihasilkan dari sektor parkir, namun lebih menekankan pada unsur layanan perparkiran pada warga yang ikut terabaikan.

"Saya pikir ini yang seharusnya menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Kalau uangnya nggak dapat, berarti layanannya juga tidak diberikan pada masyarakat. Padahal itu kewajiban pemerintah," sebut politisi PDI Perjuangan itu.

Maka dari itu, pihaknya tidak berani pasang target terlalu tinggi di tahun anggaran 2023 mendatang atau tak berubah pada angka sebesar Rp 20,4 Miliar.

"Masih tetap di angka Rp 20,4 Miliar," pungkasnya. (mams)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Politik

Sertifikasi Lahan SD dan SMP Negeri Oleh Pemkab Sidoarjo Tetap Menjadi Aset Desa

by Radar Jatim — 12 Desember 2022



H. Abdul Haris, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo.



SIDOARJO (RadarJatim.id) Selama ini ada kekhawatiran dari tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) akan kehilangan aset desa ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mensertifikatkan lahan yang dipakai untuk gedung-gedung sekolah negeri.

H. Abdul Haris, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa aset desa yang digunakan untuk gedung-gedung sekolah negeri dan disertifikasi tidak akan menjadi milik Pemkab Sidoarjo, Senin (12/12/2022).

“Bunyi dalam sertifikat atas tanah SD (Sekolah Dasar, red) Negeri atau SMP (Sekolah Menengah Pertama, red) Negeri itu adalah hak guna pakai dan bukan hak milik Pemkab Sidoarjo,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan kalau nantinya lahan tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk gedung sekolah maupun fasilitas umum lainnya ataupun dialihfungsikan, lahan tersebut tetap akan kembali ke desa.

Ia juga menjelaskan bahwa setelah sertifikat hak guna bangunan itu jadi, berkasnya disimpan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), bukannya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidoarjo.

“Ini buktinya. Kalau lahan itu jadi aset Pemkab (Sidoarjo, red), maka suratnya akan disimpan oleh BPKAD,” jelasnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Menurut legislator asal Kecamatan Waru itu bahwa masih adanya penolakan yang dilakukan Pemdes atau tokoh-tokoh masyarakat saat tanah-tanah aset desa yang dimanfaatkan untuk SD maupun SMP Negeri serta fasilitas umum lainnya akan disertifikatkan oleh Pemkab Sidoarjo.

Masih menurut Haris bahwa upaya legalisasi hak atas lahan tersebut penting agar DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa mengalokasikan anggaran guna merawat bangunan-bangunan yang ada di atasnya, sebab tanpa adanya sertifikat tersebut pengucuran dana yang dilakukan bakal dianggap ilegal.

“Jadi harus ada kesamaan pemahaman terkait hal itu antara pihak Pemkab Sidoarjo dengan pemdes maupun tokoh masyarakat. Kalau sudah disertifikatkan, kita bisa lebih enak untuk mengganggu dana renovasi dan lain sebagainya,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya selalu mendorong Pemkab Sidoarjo melalui BPKAD untuk melakukan sertifikasi lahan serta bangunan fasilitas publik tersebut.

Dan berdasarkan laporan yang diterimanya, prosesnya masih terus berjalan hingga sampai saat ini.

“On proses koq. Tapi sejauh apa progresnya, kami masih menerima informasi dari BPKAD. Sudah kami koordinasikan. Mungkin dalam satu atau dua hari ini akan saya sampaikan lagi hasilnya,” jlentrehnya.

Biaya sertifikasi untuk aset-aset tersebut Rp 300 ribu setiap bidangnya yang diambilkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo.

Dimana anggaran sebesar Rp 300 ribu itu disetor ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebesar Rp 150 ribu dan sisanya untuk honor petugas dari instansi terkait. (mams)

Tahun Depan, Semua Faskes Pemerintah Bisa Pakai JKMM

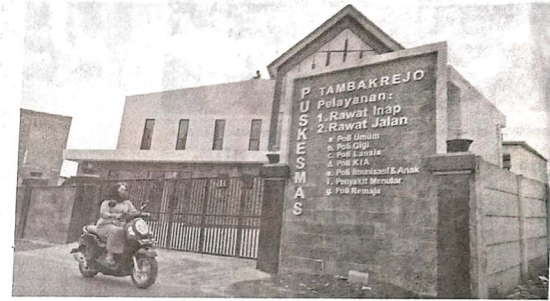
KOTA-Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu di Sidoarjo dipermudah. Yakni dengan adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Tahun depan, JKMM bisa digunakan semua fasilitas kesehatan milik pemerintah di Sidoarjo. Mulai dari puskesmas, RSUD Sidoarjo, hingga RSUD Sidoarjo Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, selain rumah sakit di Sidoarjo, ada dua rumah sakit di Surabaya yang juga menerima rujukan JKMM. Yakni di RSUD Dr Soetomo dan RSJ Menur Surabaya.

Diakui Fenny, sebelumnya pihaknya memang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta untuk rujukan

JKMM. Namun kontrak kerja sama yang berakhir pada 31 Desember itu tidak akan diperpanjang. RS swasta yang dimaksud adalah RS Anwar Medika, RSI Siti Hajar, RSI Siti Khodijah, dan RS Mitra Keluarga. "Tagihan yang belum selesai tahun ini akan dituntaskan tahun depan," katanya.

Fenny menyebutkan, alasan memutuskan kerja sama JKMM dengan RS swasta adalah karena saat ini faskes milik Pemkab Sidoarjo sudah tersedia di semua wilayah. Warga yang menggunakan JKMM bisa langsung berobat di puskesmas terdekat. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan dirujuk ke RSUD Sidoarjo atau RSUD Sidoarjo Barat.



PELAYANAN MAKSIMAL: Puskesmas Tambakrejo di Kecamatan Waru siap memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan.

Apalagi, Fenny menyebutkan RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat bakal meningkatkan pelayanan tahun depan. Seperti menambah

dokter spesialis dan membangun gedung pelayanan baru. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan di puskesmas. (nis/vga)



Pemkab Kenalkan Produk IKM pada Peserta PKN

SIDOARJO (BM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengenalkan sejumlah produk industri kecil menengah (IKM) kepada istri peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, akhir pekan lalu.

Ketua Dekranasda Sidoarjo, Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan, di Sidoarjo yang dikenal adalah industri kecil menengah. "Sidoarjo memiliki industri kecil menengah cukup banyak. Yang

ditampilkan di pendopo ini hanya sebagian di antaranya yaitu perwakilan kerajinan kulit, tekstil, batik sampai dengan produksi makanan dan minuman yang menjadi ciri khas Sidoarjo," ujarnya di depan peserta.

Ning Sasha sapaan akrab Ketua Dekranasda itu menambahkan, Sidoarjo dikenal dengan wisata perajin karena banyak desa di-canangkan kampung perajin seperti di Desa Tebel Gedangan sebagai Kampung Perajin Topi.

"Mereka menggarap topi anak sekolah yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Juga ada kampung sayangan, untuk pembuatan panci, wajan yang berukuran besar. Selain itu ada Kampung Batik Jetis," imbuhnya.

Kemudian, lanjut dia, yang tidak kalah menarik adalah industri kulit di Tanggulangin yang sudah terkenal sejak dulu yang memproduksi tas dan koper. "Selama pandemi COVID-19 perajin di Tanggulangin banyak yang me-

masarkan produk mereka secara dalam jaringan sehingga masih bisa bertahan sampai sekarang ini," sebut Ning Sasha.

Istri Ketua Angkatan PKN Tingkat II Angkatan 24, Ibu Hj. Nur Hidayati Muhammad Juaini Taofiq mengaku senang atas sambutan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan kunjungan ini. "Terima kasih sudah diterima dengan nyaman dan luar biasa karena dalam kunjungan ini bisa meningkatkan silaturahmi," katanya.

Ia mengatakan, selain meningkatkan silaturahmi dalam kunjungan tersebut juga akan dilakukan studi tiru terkait dengan pemasaran produk IKM yang dihasilkan.

Sekedar diketahui, PKN merupakan salah satu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II untuk para pejabat atau calon pejabat eselon II. Dalam acara Ladies program ini sendiri adalah pelatihan kepada istri para pejabat eselon II diberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan tugas-tugas dari suaminya.

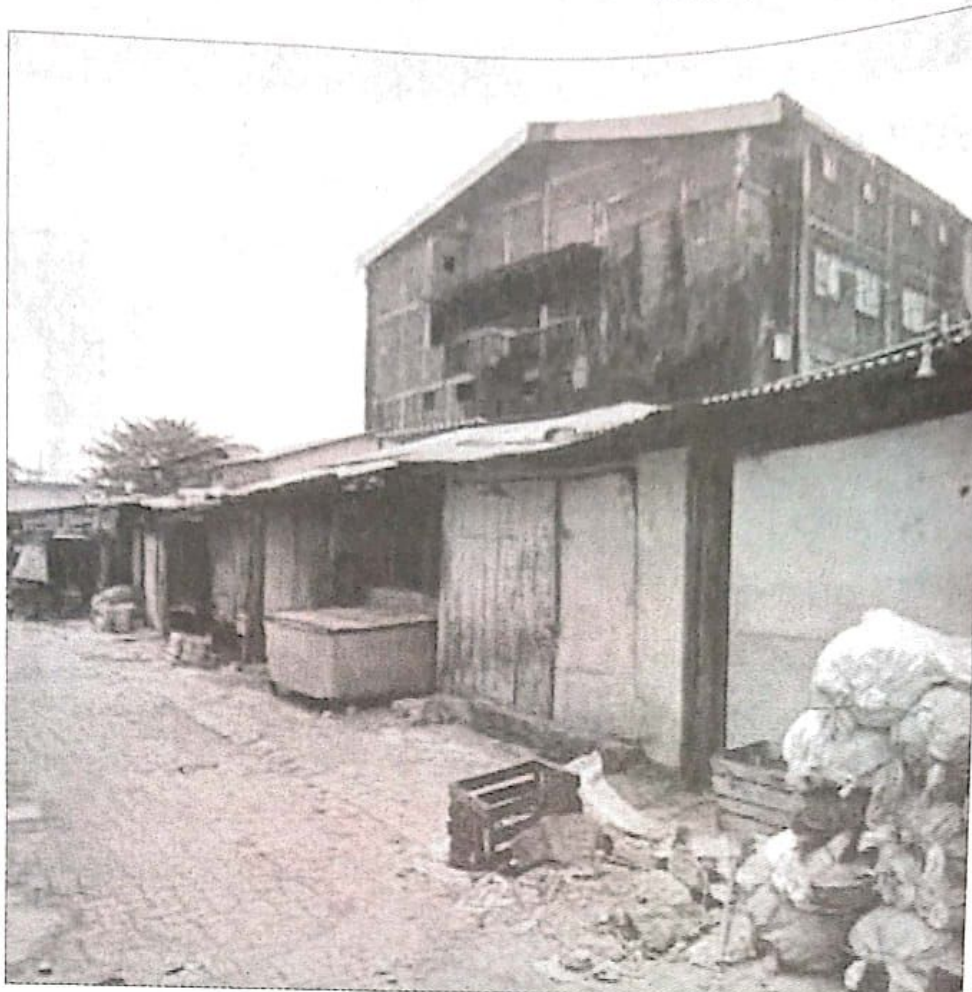
Salah satu Mata pelajaran dan orientasinya adalah kunjungan di Kabupaten/Kota salah satunya di kabupaten Sidoarjo. Spesifikasinya adalah keberhasilan UMKM atau keberhasilan hasil karya yang menjadi contoh.

Sidoarjo sendiri yang mengikuti PKN adalah Pj. Sekda Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Ari Suryono, Asisten I Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Bachruni. (udi)



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

FOTO BERSAMA: Ketua Dekranasda Sidoarjo, Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor bersama istri peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo.



BM/ST

SEPI PEMBELI: Sejumlah pedagang di Pasar Sepanjang mengeluh pasca RPU ditutup.

Pasca RPU Ditutup, Pedagang Pasar Sepanjang Mengeluh Sepi Pembeli

SIDOARJO (BM) - Imbas didemo warga lantaran masalah limbah, pedagang di pasar unggas Sepanjang, Kecamatan Taman, mengeluh. Keluhan itu terjadi pasca ditutupnya Rumah Potongung Unggas (RPU) yang berada di sebelah utara pasar tersebut.

Maisaroh, salah seorang pedagang menjelaskan, omset penjualannya saat ini menurun drastis. Hal itu, diakui merupakan salah satu dampak dari penutupan RPA di sana. Para pelanggan juga mulai sepi.

"Kalau dulu, pembeli itu abis beli ayam di depan, mereka masuk ke dalam beli sayur. Tapi sejak pemotongan itu dialihkan ke utara (Rumah Potong Hewan di Krian), pedagang banyak yang tidak ke sini," katanya, Senin (12/12).

Senada dengan Maisaroh, Eko pedagang tempe menceritakan, dampak yang

dirasakan para pedagang memang cukup signifikan. Banyak para pembeli ini yang beralih ke pasar lain padca ditutupnya RPU itu.

"Ya wajar saja sih, Mas. Kalau seumpama pembeli itu beli ayamnya di sana (RPH Krian) terus, harus muter ke sini lagi untuk beli sayur tempe dan semacamnya, pasti ongkosnya membengkak. Jadi, ya jelas, kami pedagang ada penurunan omset," ujarnya.

Sebelumnya, RPU sempat didemo warga Taman pada Kamis (17/11) lalu. Pada saat itu, warga mengkritik tercemarnya sejumlah sungai di sana. Ini disebut imbas dari limbah RPU tersebut.

Imbas demo itu, Pemkab Sidoarjo akhirnya memutuskan menutup RPU tersebut sejak tanggal 21 November lalu. (sda/udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BANGKU POJOK

BPBD Sidoarjo Bekali Siswa SMP IT Inka Pendidikan Mitigasi Bencana

Sidoarjo, Bhirawa

Siswa SMP Islam Terpadu Insan Kamil (PT Inka) dibekali mitigasi bencana oleh Petugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Sidoarjo. Edukasi ini sebagai bentuk pembekalan ketika terjadi bencana dan apa yang harus dilakukan siswa maupun guru. Mengingat kondisi gedung sekolah yang bertingkat, serta belum adanya rambu-rambu jalur evakuasi.

Sebelum dilakukan simulasi Mitigasi Bencana, para guru dan siswa terlebih dulu diberikan materi teori tentang penanganan bencana, persiapan sarana dan prasarannya, komunikasinya dan bentuk-bentuk penyelamatannya, juga penyelamatan mandiri. Termasuk juga tentang pendistribusian logistiknya.

Kepala SMP IT Insan Kamil Sekardangan, Aniqotul Uhbah, menuturkan sengaja memberikan edukasi Mitigasi Bencana kepada guru dan seluruh siswanya. Mengingat Indonesia ini sering terjadi bencana alam, sehingga pihaknya perlu mengedukasi siswa dan guru. Apalagi gedung-gedung sekolahnya hampir semuanya bertingkat. "Jadi sangat perlu sekali adanya Mitigasi Bencana, sehingga mereka akan tahu bagaimana proses penyelamatannya. Gimana jalur evakuasinya, serta di mana titik kumpulnya," tuturnya.

Dalam pelatihan mitigasi bencana ini, pihaknya bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Ini mengingat BPBD merupakan lembaga yang mumpuni dalam menangani kebencanaan. Harapannya, setelah edukasi ini siswa dan guru akan lebih mudah dan paham apa yang dilakukan pertama kali bila terjadi bencana.

Pada kesempatan itu, Koordinasi Lapangan BPBD Sidoarjo Hamdan Maulana menjelaskan kepada para siswa cara evakuasi untuk mencari jalan atau rute tercepat menuju halaman terbuka. Disamping itu bila terjadi bencana juga jangan panik dan jangan langsung lari, sembari menunggu gempa reda lebih baik bersembunyi di bawah meja.

"Ketika gempa terjadi tanah dan bangunan bergoyang, sehingga jalannya atau larinya tidak stabil. Dalam kondisi tersebut akan sulit untuk mencari tempat berlindung," katanya.[ach.ina]

SMPN 2 Tulangan



(yudi/duta)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam sidak menargetkan bulan Januari 2023 gedung SMPN 2 Tulangan sudah bisa dipakai untuk belajar mengajar

Progres Capai 90 Persen

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menargetkan bulan Januari 2023 gedung SMPN 2 Tulangan sudah bisa dipakai untuk belajar mengajar. Saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 90 persen dan ditarget rampung akhir Desember 2022. Sepuluh persen pekerjaan yang belum selesai diantaranya, pengecatan gedung, pemasangan jaringan listrik dan pembangunan IPAL.

Bupati Gus Muhdlor meninjau proyek sekolah yang berlokasi di Desa Grinting Kecamatan Tulangan itu untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu.

"Kita turun cek lapangan memastikan progres proyek pembangunan SMPN 2 Tulangan, karena pertengahan Januari 2023 nanti sudah harus dipakai belajar mengajar," ujar Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor menyampaikan, ditahap pertama ini Pemkab membangun 5 ruang kelas dan 4 ruangan yang difungsikan untuk ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang TU. Pembangunan dilanjutkan tahun depan dengan membangun 5 ruang kelas lagi termasuk memasang pagar sekolah. Untuk sementara, ratusan siswa SMPN 2 Tulangan belajar mengajarnya memakai gedung SMPN 1 Tulangan sambil menunggu pembangunan SMPN 2 Tulangan selesai baru siswa dipindah.

Bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu juga menyampaikan, dibangunnya SMPN 2 Tulangan tersebut memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk dapat menyekolahkan anaknya-anaknya ke sekolah negeri. Gus Muhdlor juga menegaskan, pemerataan akses pendidikan masuk dalam program prioritasnya, karena dengan pemerataan pendidikan membangun SDM unggul dapat terwujud.

"Pemerataan akses pendidikan ini penting sekali, dari 18 kecamatan tinggal Tulangan dan Prambon yang masih memiliki 1 sekolah SMP Negeri, dan baru tahun ini terealisasi. Untuk Kecamatan Prambon sudah ada lahannya, sekarang sudah dalam proses pembebasan untuk dibangun sekolah SMPN 2 Prambon," terang Gus Muhdlor putra KH. Agoes Ali Masyhuri Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Lebo itu. ● (Yud)

Masih Banyak Masyarakat Belum Tahu

Puskesmas Wonokasian Beroperasi

SIDOARJO - Pasca diresmikan Puskesmas Wonokasian, Kecamatan Wonoayu tanggal 5 September 2022 lalu sudah mulai aktifitas. Antusias warga sekitar sangat baik menyambut dibukanya puskesmas, pasalnya memudahkan warga sekitar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.

Risjad Ibrahim Humas puskesmas Wonokasian mengatakan pasca diresmikannya karena tempat baru kendalanya mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS). Karena puskesmas Wonokasian terletak dipedesaan.

"Jadi masih banyak warga yang belum menerapkan PHBS dan belum maksimalnya informasi mengenai pelayanan operasional puskesmas yang sudah berjalan, jadi warga belum sebagian masih banyak yang belum tahu kalau puskesmas Wonokasian sudah berialan onrasional nya,"terang Risjad



Puskesmas Wonokasian Kecamatan Wonoayu pasca diresmikan sudah mulai beraktifitas terima pasien

Masih kata Risjad berharap kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja puskesmas Wonokasian yang meliputi 8 desa antara lain: Desa Wonokasian, Ploso, Plaosan, Sumberejo, Mojourangagung, Sawocangkring, serta Lambangan dan Becrongengor dapat mengetahui bahwa pelayanan oprasional puskesmas Wonokasian sudah berjalan. Dan masyarakat dapat

memperoleh fasilitas kesehatan yang baik karena tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas Wonoayu karena sudah ada yang dekat.

"Kepada masyarakat Wonoayu, yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang murah dan baik, silakan datang ke puskesmas Wonokasian. Kami siap melayani anda dengan sepenuh hati. Selalu terapkan pola hidup bersih sehat

(PHBS),"pungkas Risjad
Sementara warga yang berobat mengatakan, Alhamdulillah puskesmas Wonokasian sudah beroperasi, karena sebelumnya warga sekitar maupun masyarakat desa yang jauh dari puskesmas Wonoayu kejauhan untuk mendapatkan layanan Kesehatan,terlebih untuk meminta surat rujukan,ujar AN warga sekitar. • Loe

DUTA

Ditertibkan Balik Lagi, Dinsos Koordinasi dengan Daerah Lain Tangani Pengemis



SULIT DITERTIBKAN: Pengemis di salah satu jalan protokol di Sidoarjo membawa anaknya.

KOTA-Keberadaan pengemis di tepi jalan utama di Sidoarjo meresahkan masyarakat. Banyak warga yang meminta Dinas Sosial untuk menertibkannya. Namun ternyata penertibannya tidak mudah.

Kepala Dinsos Sidoarjo Misbahul Munir mengatakan, beberapa kali pihaknya mendapatkan laporan dari warga. Pengemis yang meminta-minta terkadang membawa balita. "Warga mengkhawatirkan balita itu karena cuaca yang panas dan terpapar debu kendaraan," ujarnya.

Namun diakui bahwa pihaknya sudah berulang kali melakukan penertiban. Ketika didata, ternyata mereka bukan warga Sidoarjo. Melainkan warga daerah lain.

Untuk itu, Misbahul mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan daerah lain untuk penertiban tersebut. Pengemis yang sudah ditertibkan lalu didata, kemudian dikembalikan ke daerah asalnya. Dia juga meminta agar daerah tersebut bisa memberikan pembinaan agar tidak kembali ke jalan. Tetapi pihaknya tidak bisa

memastikan pengemis itu tidak akan kembali beraksi lagi. Sebab pengawasan yang dilakukan tidak bisa 24 jam.

Beberapa kali pihaknya melakukan penertiban, pengemis beralasan mereka tidak sedang mengemis. Tetapi mengumpulkan barang bekas. "Mereka membawa karung dan mengaku sedang memulung, bukan mengemis," katanya.

Sedangkan untuk pengemis yang merupakan warga Sidoarjo, pihaknya menanyakan alasan mengapa mereka turun ke jalan. Selain itu juga menanyakan permasalahan apa saja yang mereka hadapi sehingga mereka bisa turun ke jalan. "Lalu kami juga tanya potensi apa yang mereka miliki sehingga nantinya para PMKS ini dapat kami bina di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan keterampilan mereka," imbuhnya.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap PMKS, hal tersebut dilakukan agar nantinya para PMKS ini tidak kembali turun ke jalan dan juga dapat bermanfaat bagi warga sekitar. (nis/vga)



Kondisi Pasar unggas di Sepanjang yang sepi.

Efek Penutupan Rumah Potong Unggas, Pedagang Keluhkan Sepi

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Efek ditutupnya rumah pemotongan unggas yang ada di Pasar Sepanjang, Taman, Sidoarjo dikeluhkan banyak pedagang. Minggu (11/12). Kebanyakan mereka mengeluh soal nilai penjualan yang menurun. Hal ini seiring dengan para pelanggan yang mulai sepi akibat penutupan rumah pemotongan unggas itu.

Saroh (50) pedagang sayur saat ditemui di lokasi memaparkan bahwa pelanggan yang biasa membeli dagangannya, kini banyak yang beralih ke pasar lain.

"Kalau dulu kan enak Mas. Semisal pelanggan beli unggas di depan lalu dibawa ke belakang untuk dipotong. Sembari menunggu dipotong mereka bisa sekaligus beli sayur di sini. Tapi semenjak pemotongan unggas ditutup dan diarahkan ke RPH Krian dan pasar unggas dipindah ke Utara, pelanggan banyak yang nggak ke sini lagi," ujar Saroh.

Selain itu, Siti (46) penjual kelapa yang ada di area Pasar Sepanjang juga mengeluhkan hal yang sama. "Nggak hanya sayur Mas. Pedagang kelapa kayak saya juga kena imbasnya. Sekarang jadi sepi. Biasanya kan pelanggan cari langsung ke sini," terang Siti.

Selain itu, Purnomo salah satu pembeli yang juga penjual aneka penyetan yang ada di Surabaya mengatakan, jika keengganan pembeli ke sini lagi karena dinilai tidak lagi one stop service.

"Dulu one stop service Mas. Jadi saya beli unggas setelah itu saya potong ke sini. Sembari menunggu pemotongan selesai, saya beli sayur, tempe, lele dan lalapan dan kelapa untuk bumbunya. Istilahnya dulu itu sekali ke sini bisa langsung," jelas Purnomo.

Masih dikatakan Purnomo bahwa keputusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menutup pemotongan unggas dan memindah pasar unggas adalah kurang tepat. Jika dikalkulasi, Purnomo mengeluarkan lebih banyak pengeluaran karena antara pemotongan unggas, pedagang unggas, dan pedagang sayur tempatnya berbeda.

"Andai kata saya beli unggas di Pasar Taman, saya potong ke Krian. Setelah itu saya beli lagi sayurnya ke tempat lain. Nah, dari situ biaya akomodasinya jadi membengkak," terangnya.

Para pedagang yang ada di sekitaran Pasar Sepanjang berharap adanya solusi yang diberikan Pemkab untuk pedagang. Dalam hal ini para pedagang yang ada di Pasar Sepanjang, Taman, Sidoarjo.

Tak muluk-muluk. Mereka hanya meminta rumah pemotongan unggas, dan pedagang unggas yang ada saat ini jika direlokasi maka tidak jauh-jauh dari Pasar Sepanjang. (cat/rd)



Muhammad Wujud menerima hadiah sepeda gunung dari Bupati Muhdlor Ali.

Taat Bayar Pajak, Warga Wage Terima Reward

Sidoarjo, Memanfaatkan momen ini, Bupati Muhdlor Ali mengunjungi pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Saya menugaskan tim kami untuk menemui warga yang taat membayar pajak. Tak Wujud ini merupakan warga tegar yang baik, selain itu di bulan Januari sudah membayar pajak," jelasnya.

penggunaannya yakni untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Sebelum seluruh warga yang taat membayar pajak, Desa semacam ini yang harus didatangi untuk memotivasi warga agar sadar membayar pajak tepat waktu.

"Melalui momentum jalan sehat sekaligus ini saya harapkan warga Desa Wage tetap

Sebelumnya di Desa Wage ini, belum seluruh warga yang taat membayar pajak. Desa semacam ini yang harus didatangi untuk memotivasi warga agar sadar membayar pajak tepat waktu.

"Melalui momentum jalan sehat sekaligus ini saya harapkan warga Desa Wage tetap

guyuh rukun, sehat, dan kompak selalu. Ini aset yang harus kita jaga, aset itu tidak harus berupa barang," jelasnya.

Ketatan dalam membayar pajak ini juga menjadi salah satu aset pembangunan. Mengingat, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika, warga yang taat dan taat membayar pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana negara.

Diharapkan, momen ini bisa memotivasi kesadaran warga pajak untuk terus beres-beres dalam menanti dan menuntai pembayaran pajak baik individu maupun lembaga, demi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. (jok/mik)

MEMORANDUM

BERKAITAN DENGAN MEMBATAS ALAMAT



TUNGGU KERING DULU. Sejumlah kendaraan melintas di jembatan sementara Sungai Cantel, Jalan Raya Tropodo, kemarin (12/12). Jembatan Cantel selesai dibeton, tapi harus kering dulu sebelum dilewati.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalan dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jembatan Cantel Minggu Depan Bisa Dilewati

Maksimal 24 Desember Sudah Dibuka

SIDOARJO - Jembatan Sungai Cantel di Jalan Raya Tropodo minggu depan sudah bisa dibuka dan dilewati untuk umum. Saat ini betonisasi sudah tuntas. Pelapisan aspal juga sudah tuntas. Tinggal merapikan bekas bangunan dan menunggu pengaspalan kering.

Plt Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Rizal

Asnan mengatakan, pekerjaan utama jembatan penghubung Desa Tropodo dan Desa Pabean itu sudah selesai. "Aspal sudah, tinggal sedikit di sisi selatan. Sekarang hanya merapi-rapikan," katanya. Termasuk memplester *railing* atau pagar jembatan dan pengecatan pagar tersebut. "Setelah rapi dan tuntas semua, baru kami buka. Sekalian menunggu aspal kering," ujarnya.

Kepala Dinas PUBMSDA Dwi Eko Saptono mengatakan, proyek tersebut bakal lebih cepat dari target. Rencananya, 19 Desember pihaknya melakukan pengujian jembatan. Jika sudah tidak ada evaluasi dan dirasa aman, 20

Desember jembatan dibuka. "Pembukaan langsung, tidak setengah-setengah. Tapi setelah kami pastikan kualitas dan keamanannya dulu," katanya.

Pihaknya mengupayakan percepatan agar saat libur Natal dan tahun baru jalan tersebut bisa berfungsi. "Karena biasanya kan ramai. Agar tidak membe-ludak di sana, sebelum akhir Desember kami upayakan selesai," katanya. Jika aspal belum kering sempurna saat pengujian 19 Desember, pihaknya akan menunggu pembukaan hingga 24 Desember. Artinya, menurut dia, jembatan tersebut maksimal 24 Desember sudah bisa dilewati.

Sebab, Dwi menyebut saat ini hanya merapikan dan menunggu aspal kering maksimal.

"Seperti aspal di oprit atau turunan jembatan sisi selatan baru diselesaikan hari ini (kemarin, Red). Jadi, butuh waktu untuk pengeringan dulu," ujarnya. Jembatan bisa digunakan untuk motor, namun harus dicek dulu demi keamanannya. Selain itu, ada penghitungan terkait masa matang aspal atau beton sehingga bisa kering maksimal. "Prinsipnya, saat Nataru nanti sudah normal dan lancar," katanya. Setelah itu, baru jembatan baja sementara yang digunakan untuk motor saat ini dibongkar. (uzi/c19/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RSUD SIDOARJO

Usulkan Rp 80 Miliar, Disetujui Rp 70 Miliar

SIDOARJO - Proyek renovasi gedung utama dua lantai RSUD Sidoarjo segera dimulai. Sebab, dana proyek sudah disetujui. Sebelumnya RSUD Sidoarjo mengusulkan anggaran sebesar Rp 80 miliar, tetapi hasil pengesahan APBD diketahui dana yang dicairkan Rp 70 miliar.

Hal itu dikonfirmasi Direktur RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan kemarin (12/12). Menurut Atok, meskipun anggaran yang sudah digedok dalam pengesahan APBD itu berkurang dari yang diajukan, renovasi untuk menjadikan gedung utama menjadi delapan lantai akan tetap dilaksanakan.

"Dalam pengajuan itu, sudah telanjur delapan lantai, jadi ya akan tetap sesuai. Tapi, kalau nanti jadinya dan bisanya tujuh lantai *aja*, ya tidak apa," ujarnya.

Meskipun nanti hanya bisa tujuh lantai, perlengkapan medis yang baru akan tetap seperti pada perencanaan dengan delapan lantai. "Iya, bakal tetap saja dengan ditunjang digital medis nantinya," tuturnya.

Atok menyatakan, gedung utama dengan dua lantai itu sudah usang dan tua karena dibangun pada 1970-an. "Ini dibangun barengan dulu sama dengan yang GDH VIP yang belakang, dulu cuma satu lantai, terus sekarang dibangun lima lantai," ungkapnya.

Di samping itu, Atok juga mengungkapkan, karena sudah tua, drainase di gedung utama dan beberapa titik di RSUD tersebut cukup bermasalah. Apalagi saat hujan deras beberapa waktu terakhir, taman di RSUD sering terendam banjir. "Di ruang pertemuan direktur, itu juga ada rembesan dari bawah," ujar dokter spesialis paru-paru tersebut.

Atok menuturkan akan membenarkan drainase pada tahun depan bersama renovasi gedung. Namun, nanti anggaran yang digunakan untuk perbaikan drainase itu diambilkan dari BLUD. "Jelas ini juga menjadi perhatian, khususnya untuk menjadikan RSUD Sidoarjo bisa layak menjadi tipe A," ujarnya. (eza/c12/any)



BERBENAH: Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo, Jalan Majapahit. Kemarin dana perbaikan RSUD sudah digedok.

Jawa Pos



MASIH DIKERJAKAN: Jembatan Cantel di perbatasan Desa Tropodo dan Desa Pabean yang sudah tersambung.

WARU-Jembatan Cantel Desa Tropodo, Kecamatan Waru bakal segera bisa dilalui. Pekerja tinggal finishing jembatan tersebut. Dari pantauan Radar Sidoarjo, Senin (12/12), jembatan itu telah tersambung. Bahkan pekerja

telah mengaspal kedua ujung jembatan. Pengaspalan itu untuk memudahkan kendaraan melintasi jembatan. Karena, konstruksi jembatan lebih tinggi dari jalan raya.

Meski sudah tersambung dan

diaspal, namun kendaraan roda empat maupun roda dua masih belum diperkenankan melintasi jembatan. Kendaraan roda dua masih nampak bergantian memanfaatkan jembatan sementara yang dibangun di samping proyek

jembatan itu.

"Dalam waktu dekat sudah bisa dilalui, tinggal finishing saja," kata Plt Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber

● Ke Halaman 10



Tinggal Finishing,...

Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, Rizal Asnan.

Pengerjaan proyek jembatan itu sudah dimulai sejak akhir Agustus

lalu. Jalan penghubung Desa Pabean dan Tropodo itu juga sempat ditutup. Pemkab juga mengucurkan anggaran yang tidak sedikit untuk proyek tersebut. Nilainya mencapai Rp 1,8 miliar.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi juga sempat dua kali sidak ke lokasi proyek tersebut. Alasannya karena geram dengan progres pengerjaan.

Salah satu instruksi orang nomor dua di Sidoarjo itu adalah untuk

membangun jembatan alternatif di samping proyek.

Tujuannya agar pemotor bisa melintas. Karena, jalur alternatif yang ada sering dikeluhkan warga terlalu jauh. (son/vga)



Pelaku UMKM Diberi Kesempatan Promosi di Medsos Bupati

Sidoarjo, Memorandum

Setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, sudah menjadi tradisi promo besar-besaran dilakukan setiap pusat perbelanjaan pasar modern atau mal maupun toko online.

Untuk akhir tahun ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM Sidoarjo yang ingin mempromosikan usahanya lewat media sosial akun *instagram* (IG) @ahmad-muhdlorali.

Tujuannya untuk membantu promo meningkatkan omzet penjualan di akhir tahun. Selain akun diatas adalag akun IG @pemkab Sidoarjo dan @gusmuhdlor.id yang juga akan membantu mempromosikan industri kreatif Sidoarjo yang jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu.

Caranya mudah, pemilik usaha tinggal membuat template atau video yang diunggah lewat story IG kemudian DM (Direct Message) tiga akun diatas. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi usaha disarankan dalam pembuatan story disertai dengan alamat usaha.

Kesempatan ini hanya berlaku 3 hari mulai hari Rabu 14 - 16 Desember 2022. Masih ada waktu untuk membuat tem-

plate atau video story IG yang semenarik mungkin.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, endorse gratis bagi pelaku UMKM Sidoarjo itu merupakan upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi kreatif menjelang tutup tahun.

"Selama ini bila ada promo besar-besaran akhir tahun tahunnya masyarakat hanya di pusat perbelanjaan pasar modern saja seperti mal, supermarket dan start up saja. Sedangkan produk yang dihasilkan industri kreatif jarang sekali masuk dalam target belanja akhir tahun," ujarnya.

Pada hal menurut Gus Muhdlor, momen akhir tahun bisa menjadi peluang besar bagi para pelaku industri kreatif untuk meraih pundi-pundi rezeki. Setiap natal dan tahun baru merupakan dua momen hari besar yang sudah menjadi tradisi masyarakat untuk berbelanja.

Bupati muda alumni Fisp Unair Surabaya itu melihat, promosi produk melalui media sosial terbilang efektif dan



Bupati Sidoarjo yang peduli industri kreatif.

efisien, seperti halnya promosi lewat Instagram IGA.

"Dewasa ini, digitalisasi dalam pemasaran produk ataupun usaha jasa mutlak harus dilakukan bila ingin usahanya dikenal

banyak orang. Dan kita mengajak para pelaku industri kreatif untuk lebih familiar memanfaatkan media sosial demi keberlanjutan usahanya," tuturnya.

Putra Pengasuh Ponpes Bumi

Sholawat Lebo KH. Agges Ali Masyhuri itu juga mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan lewat e-commerce. Meski sebenarnya sudah ada produk UMKM Sidoarjo yang menghuasi

toko online seperti tokopedia, lazada, shopee dan bukalapak tetapi jumlahnya belum begitu banyak.

"Pemasaran usaha melalui online terus kita dorong, ya karena

na memang eranya sekarang sudah serba digital, malah yang kamu sebut mosal tidak boleh berhenti baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya," pungkas Gus Muhdlor (@jok/mik)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Ditertibkan Balik Lagi, Dinsos Koordinasi dengan Daerah Lain Tangani Pengemis



SULTI DITERTIBKAN: Pengemis di salah satu jalan protokol di Sidoarjo membawa anaknya.

KOTA-Keberadaan pengemis di tepi jalan utama di Sidoarjo meresahkan masyarakat. Banyak warga yang meminta Dinas Sosial untuk menertibkannya. Namun ternyata penertibannya tidak mudah.

Kepala Dinsos Sidoarjo Misbahul Munir mengatakan, beberapa kali pihaknya mendapatkan laporan dari warga. Pengemis yang meminta-minta terkadang membawa balita. "Warga mengkhawatirkan balita itu karena cuaca yang panas dan terpapar debu kendaraan," ujarnya.

Namun diakui bahwa pihaknya sudah berulang kali melakukan penertiban. Ketika didata, ternyata mereka bukan warga Sidoarjo. Melainkan warga daerah lain.

Untuk itu, Misbahul mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan daerah lain untuk penertiban tersebut. Pengemis yang sudah ditertibkan lalu didata, kemudian dikembalikan ke daerah asalnya. Dia juga meminta agar daerah tersebut bisa memberikan pembinaan agar tidak kembali ke jalan. Tetapi pihaknya tidak bisa

memastikan pengemis itu tidak akan kembali beraksi lagi. Sebab pengawasan yang dilakukan tidak bisa 24 jam.

Beberapa kali pihaknya melakukan penertiban, pengemis berbalasan mereka tidak sedang mengemis. Tetapi mengumpulkan barang bekas. "Mereka membawa karung dan mengaku sedang memulung, bukan mengemis," katanya.

Sedangkan untuk pengemis yang merupakan warga Sidoarjo, pihaknya menanyakan alasan mengapa mereka turun ke jalanan. Selain itu juga menanyakan permasalahan apa saja yang mereka hadapi sehingga mereka bisa turun ke jalan. "Lalu kami juga menanyakan potensi apa yang mereka miliki sehingga nantinya para PMKS ini dapat kami bina di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan keterampilan mereka," imbuhnya.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap PMKS, hal tersebut dilakukan agar nantinya para PMKS ini tidak kembali turun ke jalanan dan juga dapat bermanfaat bagi warga sekitar. (nis/vga)



Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor saat memberikan hadiah sepeda gunung pada M.Wujud karena membayar pajak PBB yang pertama

Taat Pajak, Wujud Warga Wage Dapat Sepeda Gunung dari Bupati

Sidoarjo, Pojok Kiri

Warga Desa Wage Kecamatan Taman, Muhammad Wujud mendapat reward Sepeda Gunung dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Wujud mendapat hadiah sepeda karena menjadi orang pertama di Desa Wage yang lebih dulu membayar pajak PBB. Bukan hanya patuh, tapi yang dilakukan Wujud adalah bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Uang pajak yang diterima tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Penyerahan reward tersebut bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pajak daerah yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo sekaligus jalan sehat bareng Bupati Sidoarjo, Minggu, (11/12/2022) di Balai Desa Wage.

Bupati Gus Muhdlor mengapresiasi warga Wage tersebut, menurutnya apa yang dilakukan Wujud merupakan teladan yang patut ditiru. Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo itu juga menyampaikan, bahwa penerimaan pajak penggunaannya yakni untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Ka-

bupaten Sidoarjo.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang patuh membayar pajak. Pak Wujud ini merupakan warga negara yang baik, sedari awal di bulan Januari sudah membayar pajak," jelasnya.

Sebenarnya di Desa Wage ini, belum seluruh warganya patuh membayar pajak. Desa semacam ini yang harus kita datangi untuk memotivasi warganya sadar membayar pajak. "Melalui momentum jalan sehat sekaligus ini saya harapkan warga Desa Wage tetap guyub, rukun, sehat, dan kompak selalu. Ini aset yang harus kita jaga, aset itu tidak harus berupa barang," jelasnya. Ketaatan dalam membayar pajak ini juga menjadi salah satu aset pembangunan. Mengingat, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika, warganya patuh dan taat membayar pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana negara.

Semoga momen ini bisa memotivasi kesadaran wajib pajak untuk terus bersemangat dalam mentaati dan mematuhi pembayaran pajak baik individu maupun lembaga, demi pemangunan Kabupaten Sidoarjo. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

📌 Bupati Sidoarjo Berikan Hadiah Sepeda Gunung ke Wujud, Orang Pertama di Desa Wage yang Bayar Pajak PBB

Share f t e b



Media online Kharismanews.id

· Published 13/12/2022

Last updated: 2022/12/13 at 5:26 AM



Sidoarjo, Kharismanews.id – Warga Desa Wage Kecamatan Taman, Muhammad Wujud mendapat reward Sepeda Gunung dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Wujud mendapat hadiah sepeda karena menjadi orang pertama di Desa Wage yang lebih dulu membayar pajak PBB. Bukan hanya patuh, tapi yang dilakukan Wujud adalah bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Uang uang pajak yang diterima tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Penyerahan reward tersebut bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pajak daerah yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo sekaligus jalan sehat bareng Bupati Sidoarjo, Minggu, (11/12/2022) di Balai Desa Wage.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Gus Muhdlor mengapresiasi warga Wage tersebut, menurutnya apa yang dilakukan Wujud merupakan teladan yang patut ditiru. Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo itu juga menyampaikan, bahwa penerimaan pajak penggunaannya yakni untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang patuh membayar pajak. Pak Wujud ini merupakan warga negara yang baik, sedari awal di bulan Januari sudah membayar pajak,” jelasnya.

Sebenarnya di Desa Wage ini, belum seluruh warganya patuh membayar pajak. Desa semacam ini yang harus kita datangi untuk memotivasi warganya sadar membayar pajak.

“Melalui momentum jalan sehat sekaligus ini saya harapkan warga Desa Wage tetap guyub, rukun, sehat, dan kompak selalu. Ini aset yang harus kita jaga, aset itu tidak harus berupa barang,” jelasnya.

Ketaatan dalam membayar pajak ini juga menjadi salah satu aset pembangunan. Mengingat, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika, warganya patuh dan taat membayar pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana negara.

Semoga momen ini bisa memotivasi kesadaran wajib pajak untuk terus bersemangat dalam mentaati dan mematuhi pembayaran pajak baik individu maupun lembaga, demi pemangunan Kabupaten Sidoarjo.

(Sund/eny/ir)